

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tradisi mudik lebaran menjadi fenomena yang terjadi setiap tahun dan telah menjadi kebiasaan bagi para perantau. meskipun saat ini peran *digital* telah mampu menjembatani jarak dengan berbagai fitur namun belum mampu menggantikan rasa bertemu secara langsung dengan keluarga. Tradisi ini bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan ritual budaya yang erat dengan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan mempererat tali silaturahmi. Istilah mudik identik dengan momen Idul Fitri, di mana para perantau merasa terdorong untuk kembali ke kampung halaman demi merayakan lebaran bersama keluarga. Tradisi ini menjadi momen yang selalu dinantikan karena mampu mengobati kerinduan terhadap keluarga dan tanah kelahiran. Setiap tahun, arus mudik menunjukkan kepadatan yang luar biasa di berbagai jalur transportasi, baik darat, laut, maupun udara, dengan beragam moda seperti mobil pribadi, bus, kereta api, kapal laut, hingga sepeda motor yang digunakan secara beramai-ramai (Japarudin, 2023).

Gelombang pemudik yang membanjiri berbagai moda transportasi menjadi bukti betapa kuatnya ikatan antara perantau dengan tanah kelahirannya. Namun, *euforia* mudik juga menciptakan tantangan besar. Arus perpindahan jutaan orang secara singkat mengakibatkan terjadinya lonjakan volume pemudik yang signifikan, sehingga memerlukan koordinasi sistem transportasi nasional yang terintegrasi untuk menjamin kelancaran dan keselamatan mobilitas. Tingginya volume pemudik setiap tahun menciptakan tantangan besar dalam sistem transportasi nasional. Pergerakan masyarakat secara nasional pada masa lebaran 2024 mencapai 71,7% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 193,6 juta orang, meningkat signifikan dibandingkan dengan potensi pergerakan pada lebaran 2023 yang mencapai 123,8 juta orang. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), daerah asal perjalanan terbanyak berasal dari Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang). Adapun daerah tujuan

terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), diikuti oleh Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang). Data ini mencerminkan Tingginya volume pemudik membutuhkan koordinasi sistematis. Di sinilah Kementerian Perhubungan berperan sebagai regulator transportasi nasional (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024. Tugas utamanya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, bimbingan teknis, analisis kebijakan, pengembangan SDM, dan pemberian dukungan substantif.

Pada pengaturan operasional angkutan barang pada masa angkutan lebaran 1416H/2025, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi. Pengaturan tersebut tertuang pada SKB Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 H. Tantangan besar yang dihadapi setiap tahun pada masa Angkutan Lebaran adalah memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan di tengah tingginya pergerakan masyarakat. Pada tahun 2025, berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), diperkirakan sebanyak 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Salah satu upaya konkret yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam mengatasi tantangan ini adalah penyelenggaraan program Mudik Gratis pada Angkutan Lebaran (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2025). Hal ini bisa dilihat pada gambar sebagai berikut:

Menhub Dudy: Kemenhub Tetap Selenggarakan Program Mudik Gratis pada Angkutan Lebaran 2025

☐ Berita Umum 🕒 06.03.2025

📄 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 👁️ (30277) View



Gambar 1.1 Program Mudik Gratis pada Angkutan Lebaran 2025

(Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Publik)



Gambar 1.2 Fenomena Mudik Gratis Lebaran 2025

(Sumber: @Kemenhub151)



Gambar 1.3 Program Mudik Gratis Lebaran 2025

(Sumber: @Kemenhub151)

Langkah ini dilakukan untuk menekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan di jalan raya selama periode lebaran, serta yang paling penting demi alasan keselamatan para pemudik, terutama sepeda motor yang memiliki potensi kecelakaan yang cukup tinggi. Pentingnya program mudik gratis semakin terlihat ketika memperhatikan fenomena kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di lapangan, khususnya selama masa arus mudik Lebaran.

Sejalan dengan itu, Menurut Zaenal dalam buku manajemen pelayanan publik dalam Kussanti & Leliana (2018) fungsi Humas pemerintah tidak bersifat politis. Keberadaan Humas di lembaga pemerintah bertujuan untuk menyebarluaskan dan mempromosikan kebijakan-kebijakan melalui pemberian informasi yang rutin, pelayanan kepada masyarakat, serta menjalin hubungan dengan media. Intinya, Kampanye Humas Pemerintah dibentuk bukan untuk kepentingan politik, melainkan untuk menyampaikan berbagai kebijakan, program, hasil kerja, peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain yang berdampak pada masyarakat. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa Humas Pemerintah bersifat non-komersial, dengan fungsi utama sebagai penyedia informasi, penghubung antara instansi dan masyarakat, serta pelayan publik dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lembaga terkait.

Peran Kampanye humas pemerintah sebagai penghubung antara instansi dan publik tercermin dalam respons terhadap fenomena meningkatnya risiko kecelakaan saat mudik. Menurut Nugraha & Manggalou (2024), Dari tahun ke tahun, lonjakan volume kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil menjadi pemandangan yang umum terjadi di jalan raya. Namun, hal ini juga diiringi dengan tingginya angka kecelakaan, terutama yang melibatkan pengendara sepeda motor. Tingginya angka kecelakaan ini mencerminkan kerentanan pengendara roda dua sekaligus menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih konkret guna mengurangi risiko kecelakaan selama mudik. Oleh karena itu, berangkat dari fenomena tersebut diatas Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, atau perusahaan swasta guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan selama dalam perjalanan. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana Penerapan Model Kampanye Ostergraad pada Humas Kementerian Perhubungan dalam Mensosialisasikan Program Mudik Gratis Lebaran 2025?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi Penerapan Model Kampanye Ostergraad Pada Humas Kementerian Perhubungan dalam Mensosialisasikan Program Mudik Gratis Lebaran 2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana penerapan model kampanye ostergraad pada humas kementerian perhubungan dalam mensosialisasikan program mudik gratis lebaran 2025

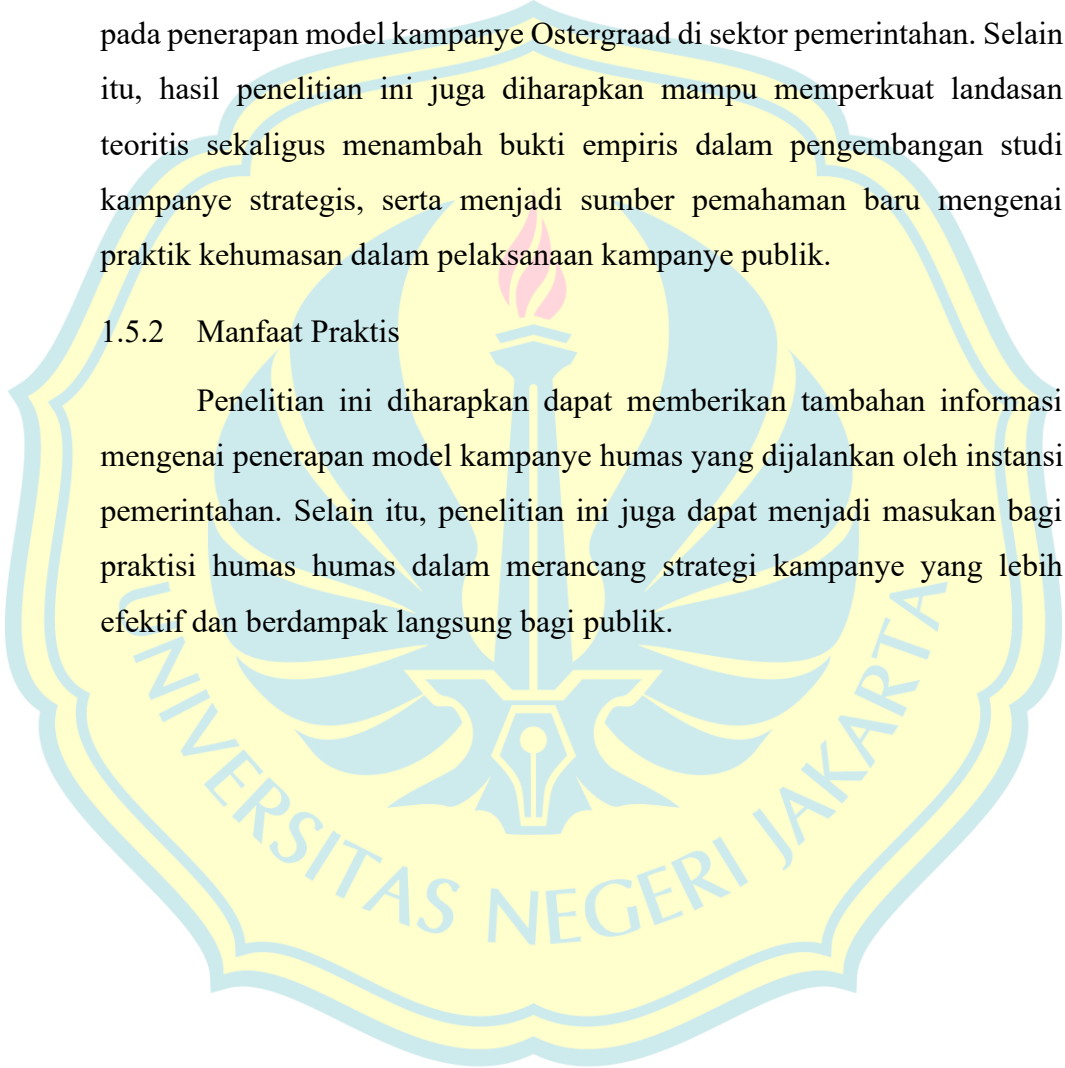
1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan memperluas referensi literatur yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada penerapan model kampanye Ostergraad di sektor pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat landasan teoritis sekaligus menambah bukti empiris dalam pengembangan studi kampanye strategis, serta menjadi sumber pemahaman baru mengenai praktik kehumasan dalam pelaksanaan kampanye publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai penerapan model kampanye humas yang dijalankan oleh instansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi praktisi humas dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi publik.



Intelligentia - Dignitas